

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penganggaran merupakan proses atau suatu metode untuk menyiapkan suatu anggaran. Dalam sektor publik, penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif, apabila tidak efektif akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang harus ada dalam sektor publik yakni aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik agar penganggaran tersebut dapat tercapai dengan baik.

Dalam suatu organisasi maupun perusahaan, anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Anggaran juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya suatu organisasi.

Tercapainya pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri. Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian APBD. Pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga

publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparan dan bertanggungjawab.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintah yang demokratis menuntut adanya transparansi dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, agar pengelolaan keuangan mencapai sasaran dibutuhkan transparansi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wujud dari akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD dalam pelayanan masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban

keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya.

Suatu instansi pemerintah daerah yang mengelola pendapatan dan pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagai organisasi sektor publik, DPPK Pemerintah Humbang Hasundutan memiliki tantangan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Kemandirian dalam pengelolaan kegiatan operasional organisasi harus diikuti adanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang disajikan DPPK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memerlukan pengelolaan pendapatan yang akuntabel dan profesional untuk kegiatan organisasi. Dilihat dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai tahun 2010 sampai dengan 2014 sudah bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangannya dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Alasan dipilihnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai objek penelitian dikarenakan jadwal penetapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih kurang tepat waktu dimana perencanaan anggaran melewati dari waktu yang telah ditentukan. Penetapan penganggaran yang tidak tepat waktu yang dilakukan secara terburu-buru pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan sangat berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Ayu Wulandari Aswadi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel yaitu penganggaran serta objek yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik membahas tentang apakah ada pengaruh penganggaran terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul tentang: **“Pengaruh Penganggaran, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penganggaran berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?
3. Apakah transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?
4. Apakah penganggaran, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Untuk mengetahui penganggaran, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh penganggaran, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bagi akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengaruh penganggaran, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh penganggaran, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedepannya diharapkan

menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penganggaran

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Darsono P dan Ari Purwanti mengemukakan bahwa:

Penganggaran ialah proses penyusunan anggaran, yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan.¹

Sedangkan menurut Indra Bastian mengemukakan bahwa: **“Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”²**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan.

¹ Darsono P dan Ari Purwanti, **Penganggaran Perusahaan: Teknik Mengetahui dan Memahami Penyajian Anggaran Perusahaan sebagai Pedoaman Pelaksanaan dan Pengendalian Aktivitas Bisnis**, Edisi Kedua: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal. 1

² Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal.

Perencanaan dalam penyiapan anggaran sangat penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Penganggaran merupakan aktivitas yang terus-menerus dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan.

Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun.

Sebelum menyusun anggaran pemerintah harus menyusun rencana strategis. Rencana strategis itu disusun berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan internal dan hasil analisis dari ancaman dan kesempatan eksternal dalam jangka panjang dan jangka pendek. Proses perencanaan yang dilaksanakan akan menentukan aktivitas organisasi dan fokus strategi organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penganggaran bersifat sangat dinamis. Munculnya konsep *good governance* sangat menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- 1. Prinsip pertama, demokratis**
- 2. Prinsip kedua, adil**
- 3. Prinsip keempat, transparan**
- 4. Prinsip kelima, berhati-hati**
- 5. Prinsip keenam, akuntabel³**

Penjelasan prinsip penganggaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Demokratis

³ **Ibid**, hal. 193

Demokratis mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.

2. Adil

Adil berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proposional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

3. Transparan

Transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.

4. Bermoral tinggi

Bermoral tinggi berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.

5. Berhati-hati

Berhati-hati berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.

6. Akuntabel

Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

Pada dasarnya, keseluruhan prinsip-prinsip tersebut harus dapat diakomodasi secara utuh dalam sistem penganggaran publik. Namun, sesuai perkembangan zaman, sistem penganggaran harus mampu mengakomodasi dinamika prinsip-prinsip tersebut. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen.

Menurut Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati fungsi penganggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

- 1. Anggaran sebagai alat perencanaan**
- 2. Anggaran sebagai alat pengendalian**
- 3. Anggaran sebagai alat kebijakan**
- 4. Anggaran sebagai alat politik**
- 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi**
- 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja**
- 7. Anggaran sebagai alat motivasi⁴**

Penjelasan fungsi-fungsi penganggaran sektor publik di atas adalah:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal,

⁴ Deddy Nordiawan dkk., **Akuntansi Pemerintahan**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 152

apakah memberlakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang, tetapi masih mungkin dicapai”. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi dan jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Catur Sasongko dan Safrida Rumondang Parulian tujuan anggaran adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**
2. **Koordinasi**
3. **Motivasi**
4. **Pengendalian**⁵

Penjelasan tujuan anggaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

2. Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan.

3. Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

4. Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

2.2 Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 :

⁵Catur Sasongko dan Safrida Rumondang Parulian, **Penganggaran Perusahaan**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 3

Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.⁶

Akuntabilitas sudah menjadi kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk menerangkan hasil kinerja apakah itu berhasil atau tidak, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara periodik.

Menurut Muindro Renyowijoyo:

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁷

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. **akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan**
- b. **akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)**⁸

Penjelasan pembagian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Vertical Accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR.

- b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountanbility*)

Horizontal Accountability adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

⁶Anggota IKAPI, **Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010**, Edisi Terbaru, Cetakan Pertama: Fokus Media, Bandung, 2012, hal. 21

⁷Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba**, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hal. 21

⁸Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: ANDI, Yogyakarta, 2009, hal. 21

Pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 1, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusnya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah.

2.3 Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Transparansi adalah:

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁹

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

⁹ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hal. 22

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan adanya transparansi pemerintah yang ditunjang dengan penunjang bukunya yang jelas, akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan atau penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan dapat dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa: **“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”**.¹⁰

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

¹⁰ **Ibid**, hal. 21

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

2.4.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa:

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.¹¹

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer

¹¹ Ibid, hal. 31

d. Pembiayaan (*financing*)¹²

Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambahkan Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

¹² Loc. Cit

3. Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**
- b. **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.**
- c. **Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.¹³**

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a. **Pendapatan-LO**
- b. **Beban**
- c. **Transfer**
- d. **Pos Luar Biasa¹⁴**

¹³ **Ibid**, hal. 32

¹⁴ **Ibid**, hal. 34

Penjelasan unsur laporan operasional di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi laba, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.**
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.¹⁵**

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

¹⁵ **Ibid**, hal. 35

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
- b. **Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
- c. **Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- d. **Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- e. **Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
- f. **Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahann yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;**
- g. **Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.¹⁶**

2.4.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga memberikan perhatian terhadap neraca-neraca serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangan.

¹⁶ Loc. Cit

Deddy Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati mengungkapkan tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu:

...tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;**
- 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan dana ekuitas pemerintah;**
- 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;**
- 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;**
- 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;**
- 6. Menyediakan informasi mengenai posisi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;**
- 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.¹⁷**

Menurut Nunuy Nur Afiah tujuan umum laporan keuangan adalah:

...menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.¹⁸

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi, dari semua kelompok pengguna. Para pengguna laporan keuangan di pemerintah daerah yang utama adalah DPRD, masyarakat para pembayar pajak, masyarakat pemilih, pemasok, pihak kreditur, donatur, pemerintah pusat, para pemerhati pemerintah daerah, selain para pemimpin dan pelaksana manajemen pemerintah daerah sendiri yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang relevan.

¹⁷ Deddy Nordiawan dkk, **Op. Cit.**, hal. 152

¹⁸ Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2009, hal. 161

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.¹⁹

2.4.4 Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintah) menyebutkan bahwa:

Prinsip akuntansi dan pelaporan dimaksudkan agar sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: Basis Akuntansi, Prinsip Nilai Historis, Prinsip Realisasi, Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, Prinsip Realisasi, Prinsip Konsistensi, Prinsip Pengungkapan Lengkap, dan Prinsip Penyajian Wajar.²⁰

Penjelasan dari 8 (delapan) prinsip tersebut yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Prinsip Nilai Historis

¹⁹ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hal. 19

²⁰ *Ibid*, hal. 27

Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas. Prinsip layak memandingkan biaya terhadap pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Realisasi

Kegiatan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya

yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.5 Tinjauan Empiris (Penelitian Terdahulu)

Sri Ayu Wulandari Aswadi (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Pinrang) dengan hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan melakukan penelitian di 32 SKPD pada pemerintahan di kabupaten Pinrang dengan jumlah responden sebanyak 70 orang.

Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dalam penelitiannya, Purwaniati dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan prasarana dan sarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan dengan mendistribusikan kuisioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

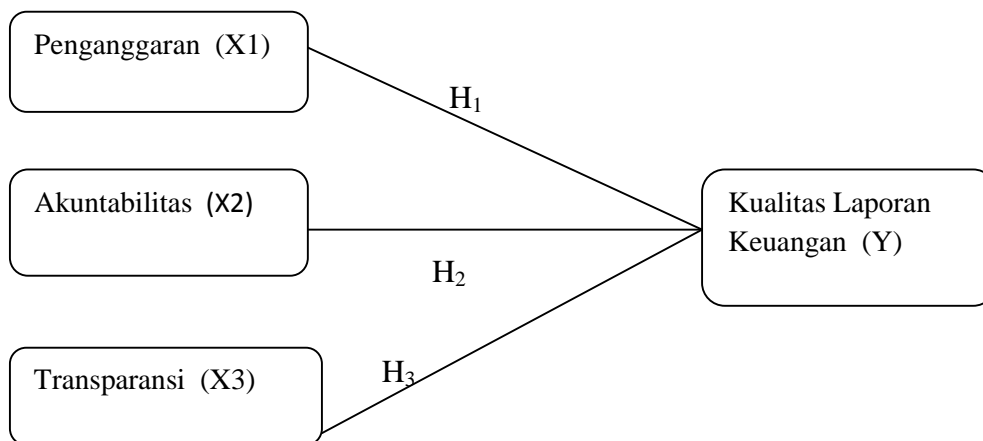
Tantriani Sukmaningrum (2012), meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Dan Kota Semarang) dengan hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan faktor eksternal tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Bestari Dwi Handayani (2008) dengan judul Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBD kota Semarang.

2.6 Kerangka Berpikir

Perhatian Masyarakat luas terhadap isu penganggaran, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat melihat kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut dapat melihatnya dengan cara pengaruhnya pada penganggaran, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan paparan singkat tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

2.7 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penganggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bestari Dwi Handayani (2008) dengan judul Pengaruh reformasi penyusunan anggaran terhadap kualitas APBD kota Semarang, menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas APBD kota Semarang. Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis menarik hipotesis pertama

H₁: Penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan

Permana (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah.

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hadi Sumarsono (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga

tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

H₃: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4. Pengaruh Penganggaran, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bestari Dwi Handayani (2008) dengan judul Pengaruh reformasi penyusunan anggaran terhadap kualitas APBD kota Semarang, menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas APBD kota Semarang. Dan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswada (2014), dengan hasil penelitian akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Hadi Sumarsono transparansi adalah “keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat”. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

H₄: Penganggaran, Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan adalah pada Humbang Hasundutan yang terletak pada jalan Siborongborong km. 2,2. Fokus pembahasan memakai pengaruh penganggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan Pengaruh Penganggaran, Akuntabilitas, dan Transparansi sebagai variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Dr. Siswojo dalam buku Mardalis mengemukakan bahwa populasi adalah: **“...sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan peneliti.”**²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari 115 SKPD pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3.2 Sampel

²¹ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas: Bumi Aksara: Jakarta, 2010, hal. 54

Menurut Sugiyono mendefinisikan: **“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”**²²

Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan sampel dapat digunakan dengan cara *random* atau sebagian, dan dengan sensus, yaitu keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian (*total sampling*). Menurut Sugiyono mengatakan bahwa: **“*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”**²³

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan kepala dinas, sekretaris dinas, kassubag keuangan, kepala bidang, dan bendahara di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Telah menduduki jabatan dan masa kerja minimal selama satu tahun.
3. Individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Responden Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Responden	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	12
3.	Sub. Bagian Keuangan	12

²² Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&O** Edisi ketujuh, Cetakan Keenam belas: Alfabeta, Bandung, 2012, hal.116

²³ **Ibid**, hal. 122

4.	Kepala Bidang	4
5.	Bendahara	6
	Jumlah	35

Sumber: Sub. Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Jadi jumlah responden ada 35 orang. Kuisisioner diberikan langsung kepada responden, kemudian diterima kembali pada waktu yang disepakati dengan responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuisisioner
2. Data kualitatif, berupa informasi baik lisan maupun tulisan yang diperoleh melalui studi pustaka, karangan ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi riil yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan kuisisioner.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

2. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap dokumen dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui riset ke perpustakaan dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3.6 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel-variabel tersebut didefenisikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel X1 Penganggaran	1. Perencanaan 2. Penyusunan	- Anggaran dimulai dengan penentuan rencana anggaran dan berdasarkan penetapan target anggaran - Penyusunan dilakukan dengan tujuan anggaran dan penetapan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/W	Kusioner	Likert

	<p>3. Pelaksanaan</p> <p>4. Pelaporan dan pemeriksaan kinerja</p>	<p>alikota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program, kegiatan dan keluaran harus disajikan dengan jelas oleh pemerintah - Pelaksanaan penganggaran perlu adanya penerapan efisiensi (savings) oleh pemerintah - Laporan keuangan dalam anggaran terdiri dari neraca realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas keuangan 		
<p>Variabel X2 Akuntabilitas</p> <p>Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)</p>	<p>1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum</p> <p>2. Akuntabilitas proses</p> <p>3. Akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>) serta adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik - Prosedur-prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya - Untuk pertimbangan 	Kusioner	Likert

	Program	apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal		
	4. Akuntabilitas Kebijakan	- Pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas		
Variabel X3 Transparansi Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)	1. Komunikasi publik oleh pemerintah 2. Akseibilitas masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan laporan keuangan	- Laporan keuangan mudah diakses - Terbukanya informasi proses dan kebijakan dalam laporan keuangan - Sistem pemberian informasi kepada publik - Laporan pertanggungjawaban tepat waktu - Dokumen laporan keuangan mudah diakses	Kusioner	Likert
Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan	1. Relevan	- Memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat aktu	Kusioner	Likert

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan	2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	dan lengkap - Tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material penyajian jujur, serta dapat diverifikasi - Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya - Mengandung pengetahuan yang memadai		
--	--	--	--	--

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner di mana jawaban diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = diberi skor 2
3. Netral (N) = diberi skor 3
4. Setuju (S) = diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) = diberi skor 5

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji reliabilitas

Reliabilitas pengukuran dibuktikan dengan konsistensi. Menurut Iqbal Hasan:

“Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya.”²⁴

²⁴ Iqbal Hasan, **Analisis Data: Dengan Statistik**, Cetakan Keempat: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 15

Suatu kusioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan *Alfa Cronbach*. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha, semakin dekat Alfa Cronbach dengan 0.6, semakin tinggi reliabilitasnya. Menurut Duwi Priyatno: **“Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan di atas 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik”**.²⁵

3.7.2 Uji Validitas

Menurut Iqbal Hasan: **“Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur, artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”**.²⁶

Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (*content validity*) menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antar setiap skor butir instrumen dengan skor total.

Dalam melakukan pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu *SPSS for Windows 17*, dan jika suatu alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap skor totalnya maka dikatakan alat skor tersebut adalah valid.

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Multikolinearitas

²⁵ Duwi Priyatno, **SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis**, Edisi Terbaru, Jakarta, 2014, hal. 64

²⁶ Iqbal Hasan, **Op.Cit.**, hal. 15

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinearitas.

Mengukur multikolinearitas dapat diketahui dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian, jika nilai VIF lebih kecil dari 5 dan nilai Tolerance di atas 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen.

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homokedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model heteroskedastisitas.

Cara menentukan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Spearman's rho*, yaitu mengkorelasi nilai residual (*Undersrtandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikan korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.8.3 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Dasar pengumpulan keputusan: 1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.9 Uji Hipotesis

Menurut Iqbal Hasan: **“Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis tersebut”**.²⁷

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Formulasi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

X_1 : Variabel Penganggaran

X_2 : Variabel Akuntabilitas

²⁷ Ibid, hal. 31

- X_3 : Variabel Transparansi
- a : Konstan
- $b_1 b_2 b_3$: Koefisien regresi dari Variabel X_1, X_2 dan X_3
- e : Kesalahan residual (error)

Persamaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ($= 0,05$).

3.9.1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut Spss 17 bahwa: **“Uji T dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menggunakan variabel lain bersifat konstan”**.²⁸

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*parsial*) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($= 5\%$) dan juga membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel.

Penolakan atau penerimaan hipotesis dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Sedangkan, penolakan atau penerimaan hipotesis dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak. Dan 2) Jika t-hitung $<$ t-tabel maka hipotesis ditolak.

3.9.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

²⁸ Christianus S, **Belajar Kilat: SPSS 17**, Edisi Pertama: ANDI, Yogyakarta, 2010, hal. 148

Spss 17 mengemukakan uji F, yaitu: **“Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen”**.²⁹

Uji ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (serentak). Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA). Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan melihat signifikansi dan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA < 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil F-hitung > F-tabel maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau H0 ditolak.

3.9.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu penerapan SAP, penganggaran, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nilai R^2 mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), hal ini berarti:

1. Jika $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen.

²⁹ Loc. Cit

2. Jika R^2 mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan
3. Jika R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.